

**PERSEPSI DOSEN SYARIAH UIN SUSKA TERHADAP ZAKAT
PENGHASILAN DI TINJAU MENURUT FATWA MUI NO.3
TAHUN 2003**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)



Oleh :

AGUS SETIA BUDI
10621003707

**PROGRAM S1
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUSKA RIAU
2011**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **“Persepsi Dosen Syari’ah UIN Suska Terhadap Zakat Penghasilan Ditinjau Menurut Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 ”**.

Adapun penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh beberapa sumber yang sangat dipercaya menjelaskan bahwa di UIN khususnya dosen fakultas Syari’ah sebenarnya sudah melakukan hal ini, tetapi belum ada tanggapan dengan usulan bahwa setiap PNS di Lingkungan UIN diwajibkan mengeluarkan zakat profesinya. Jadi sebagian dari dosen membayarkan zakatnya secara personal (sendiri-sendiri), sedangkan yang lainnya tidak melakukan pembayaran zakat karena belum ada peraturan katanya. Padahal kalau kita lihat sebenarnya hasil dari PNS ini sudah mewajibkan untuk membayar zakatnya. Seperti kita ketahui sampai saat ini belum adanya Unit Pengumpulan Zakat (PNS) di UIN Suska maupun di fakultas Syari’ah sendiri.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan, yakni persepsi Dosen Syariah tentang zakat penghasilan, Bagaimanakah persepsi Dosen Syariah Terhadap zakat Penghasilan ditinjau menurut Fatwa MUI No.3 Tahun 2003.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Kampus UIN Suska Riau. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara, kuisioner/ angket dan study pustaka. Sebagai data primer yang diperoleh dari kuesioner dan juga hasil wawancara dengan dosen syari’ah di UIN suska. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan dengan cara memperhatikan dan mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Setelah data tersebut diperoleh, lalu dianalisa dengan menggunakan teknik deskriptif analitik. Sedangkan yang menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 78 orang, karena jumlah populasinya cukup banyak, maka penulis mengambil 40 orang untuk dijadikan sampel.

Dari uraian-uraian yang disajikan dan dari berbagai tinjauan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa persepsi pegawai negeri sipil terhadap zakat penghasilan tergolong cukup baik, hal ini dapat dibuktikan dari wawancara dan angket yang telah disebarkan di kantor fakultas syariah maupun dengan dosen yang tidak berkantor di fakultas syariah dan dapat dilihat dalam bab empat. Akan tetapi zakat penghasilan ini belum di optimalkan dengan baik.. Sedangkan zakat penghasilan menurut Fatwa MUI No.3 tahun 2003 bahwa dengan dilaksanakannya zakat penghasilan ini. Akan menimbulkan kemaslahatan pada masyarakat disekitarnya, karena, harta yang mereka miliki tidak beredar dikalangan tertentu saja. Dan tentunya zakat penghasilan ini dikeluarkan setelah mencapai nisab dari hasil bersih dan bukan dari hasil kotor atau bruto.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT semesta alam yang telah memberikan rahmat, nikmat, kurnia, taufik serta hidayahnya kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul **“PERSEPSI DOSEN SYARIAH UIN SUSKA TERHADAP ZAKAT PENGHASILAN DI TINJAU MENURUT FATWA MUI NO. 3 TAHUN 2003”**. ini dapat di selesaikan.

Sholawat serta salam tak lupa penulis ucapkan buat junjungan Nabiullah Rasulullah SAW, Allahumma sholli ala Muhammad wa ‘ala ali Muhammad, semoga sholawat ini juga tercurah kepada orang-orang yang istiqomah berada di jalan-Nya.

Dalam pembuatan skripsi ini, tidak terlepas dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ayahnda dan Ibunda (M.Rofi’i & Sujiati), yang tak henti-hentinya telah mendo’akan dan bantuan moril maupun materil kepada penulis hingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Prof. Dr. H. M. Nazir selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
3. Dr. H. Akbarizan, M. Ag, M. Pd, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Suska Riau.
4. Bpk Yusron Sabili, M. Ag. Selaku ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah dan Bpk Zainal Arifin, M. Ag. Selaku sekretaris jurusan Ahwal Al- Syakhsiyah yang telah memberikan dorongan terselesaikan skripsi ini.
5. Bpk Asril, S.H.I, MH, selaku Pembimbing penulis dan juga Dosen penulis yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Ibu Hj. Asmiwati, MA. Selaku penasehat akademis yang telah memberikan motivasi dan terselesaikannya skripsi ini.
7. Bpk Drs. Pardi Syamsudin MA. Yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Semua Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

9. Kepada saudara-saudaraku untuk kakakku Siti Nurjannah (Yunah), yang telah berjasa dalam memberikan masukan, saran, juga kepada kak Nining Isna Wati (Yuning), Mohd. Wiyono(Kang No), kemudian kepada Mohd. Winario, S.El, (Kang Win) yang telah memberi motivasi, kritik, saran, dan bantuan fasilitas dalam menyelesaikan skripsi ini. Juga kepada adikku Gusti Rahayu Rahmawati, Miftahul Sulha Badriah, juga keponakanku si Nicky, Ain dan Ilma yang lucu dan bandel yang banyak memberikan sensasi tersendiri.
10. Teman-teman angkatan AH '06 AH1, AH2, AH3, yang selalu menemani dalam suka maupun duka (Miji, Ilham, Nisa, Fina, Sari, Wiwit, Mas Dudi, Anita, Akmal, Eed, Izul, Buya, Rahman, Pardi, Liddin, Repri, Syukur, Ari, Asri, Akmal)
11. Teman-teman dikampus Rahmi, Dedek, Ulul, Dasrif, Salim, Yayan, Yuyun, lestari, Yeni, Yanti, Ana dll
12. Teman-teman di Kost, Tian, Furqan, Isan, Bg, Surya, Dewi,
13. Serta teman-teman dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri, dan penulis yakin dalam skripsi ini terdapat kekurangan dan kelemahan. Penulis berharap kritikan dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, Oktober 2011

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	1
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN UMUM FAKULTAS SYARIAH	13
A. Sejarah.....	13
B. Visi dan Misi.....	17
C. Dosen Syariah.....	19
BAB III TINJAUAN TEORITIS PERSEPSI DAN ZAKAT	
PENGHASILAN	23
A. Persepsi.....	23
1. Pengertian Persepsi.....	23
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi.....	26

B. Zakat Penghasilan.....	28
1. Pengertian Zakat Penghasilan.....	28
2. Dasar Hukum	33
3. Pendapat Ulama Tentang zakat penghasilan.....	37
BAB IV ANALISIS FATWA MUI NO. 3 TAHUN 2003.....	47
A. Fatwa MUI NO 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.....	47
B. Persepsi Dosen Syariah zakat penghasilan	48
C. Tinjauan Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 Terhadap Persepsi Dosen Syariah UIN Suska.....	53
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

01. Tingkat Pendidikan Dosen Syariah UIN Suska.....	20
02. Tingkat Keahlian Dosen Syariah UIN Suska.....	21
03. Mengetahui Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 Tentang zakat penghasilan..	49
04. Dosen Syariah Mengeluarkan Zakat Penghasilannya.....	49
05. Alasan Dosen Syariah Mengeluarkan Zakat Penghasilan.....	50
06. Alasan logika Dosen Mengeluarkan zakat Penghasilan.....	51
07. Perasaan Dosen Syariah setelah mengeluarkan zakat penghasilan.....	51
08. Alasan Dosen Syariah tidak mengeluarkan zakat penghasilan.....	52
09. Bagaimana seharusnya pengelolaan zakat penghasilan.....	52

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam¹. Banyak nilai-nilai positif dan relevansi yang terkandung dalam pemberian zakat. Jika diberdayakan secara profesional dapat memberi kontribusi yang sangat berharga bagi kalangan umat Islam dan juga bagi umat agama lain (*non* Islam). Zakat dapat menjadi sarana pendekatan kepada Tuhan dan dapat dipergunakan negara untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, oleh karenanya zakat memiliki peran ganda sebagai aqidah dan juga syari'at.

Perintah wajib zakat dengan tegas diperintahkan dalam ajaran Islam. Selain terdapat di dalam al-Qur'an juga banyak ditemukan hadits Nabi Saw tentang keutamaan orang-orang yang mengeluarkan zakat. Wahbah al-Zuhayly menjelaskan bahwa zakat diwajibkan dalam al-Qur'an, Sunnah (hadits) dan juga Ijma' ulama².

Sangat berbeda sekali dengan umat-umat selain Islam. Bagi umat agama lain tidak ada ditemukan perintah wajib zakat seperti yang dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Zakat diperintahkan atau diwajibkan ketika umat Islam sudah hijrah ke Madinah. Selagi masih di Makkah belum ada ketegasan tentang perintah wajib zakat. Walaupun ada pemberian zakat namun belum

¹Hadis yang menjelaskan tentang rukun Islam dapat dilihat dalam kitab hadits Shahih Muslim. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra., ia berkata: Nabi saw. bersabda: Islam dibangun di atas lima perkara, mengesakan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa Ramadhan dan menunaikan haji. (Shahih Muslim).

²Wahbah Zuhayly, *al-Fiqh al-Islami Adillatuh*, (Bandung: Rosdakarya Offset, 1997), h. 89.

seperti ketentuan setelah periode Madinah. Sebagaimana diungkapkan Syaih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa menurut pendapat yang lebih kuat bahwa zakat diwajibkan sejak Rasulullah berada di Makkah, sementara mengenai ukuran nishab, harta-harta yang wajib dizakati, serta golongan yang berhak menerimanya penetapannya adalah di Madinah³. Ada nilai-nilai positif dari metode Allah dalam menetapkan kewajiban zakat. Pada periode Makkah orientasinya adalah menanamkan tiang aqidah Tauhid, mengesakan Allah. Manakala tiang aqidah atau *hablum min Allah* sudah berdiri kokoh dalam keyakinan umat Islam, maka bangunan *hablum minannas* akan mudah direalisasikan.

Diantara ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat terdapat dalam QS. Al-Baqarah:110 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”⁴. (QS. Al-Baqarah: 110)

Selain itu terdapat juga di dalam Surah An-Nur: 56 yang berbunyi:

³Syaih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Zakat*, ter. Suharlan, dkk. cet. I, (Jakarta: Darus Sunah, 2008), h. 7.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Penerbit : PT Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), h.30

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat”⁵. (QS. An-Nur: 56)

Zakat bukanlah sekedar menunaikan kewajiban dan memberi hak mustahiq. Suatu kesalahan besar yang menganggap bahwa zakat adalah pemberian orang kaya kepada fakir miskin. Pemberian zakat juga bukanlah merupakan kemurahan hati para *muzakki* kepada *mustahik*, akan tetapi pemberian zakat adalah untuk membersihkan hati si *muzakki* dari sifat kikir. Zakat yang ditunaikan dengan niat ikhlas dapat membebaskan jiwa dari perbudakan harta. Zakat adalah hak mustahiq yang didalamnya ada golongan fakir miskin, pemberian zakat bukan berdasarkan belas kasih orang-orang kaya.

Secara makro menunaikan zakat bernilai ibadah dan salah satu bukti konkrit ketaatan seseorang dalam mengikuti dan melaksanakan perintah Allah Swt. Secara mikro zakat yang dikeluarkan diantaranya adalah untuk membantu mereka yang membutuhkan. Sehingga umat Islam tidak ada ditemukan lagi orang miskin dan selalu kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Nabi Saw dalam do'anya memohon kepada Allah agar terhindar dari kefaqiran dan kekafiran.

Nilai-nilai sosial kemasyarakatan juga terkandung dalam ajaran perintah zakat ini. Zakat dapat meningkatkan kesejahteraan, menjalin keharmonisan dan menepis kesenjangan strata sosial dalam kehidupan

⁵*Ibid*, h. 554

bermasyarakat, menghubungkan jurang perbedaan antara kaya dengan orang-orang miskin. Orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat dengan niat ikhlas mengharap ridha dari Allah Swt akan disenangi orang lain dan juga mendapat berkah hartanya.

Zakat sebagaimana telah jelas bagi kita, adalah kewajiban yang bersifat pasti telah ditetapkan sebagai sesuatu kewajiban dari Allah dikeluarkan oleh orang yang mengharapkan ridha Allah dan balasan kehidupan yang baik di akhirat nanti.

Kemudian selain dari pada itu, bahwa pelaksanaan zakat ini harus diawasi oleh penguasa, dilakukan oleh petugas yang rapi dan teratur, dipungut dari orang yang wajib mengeluarkannya untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dari berbagai macam bentuk zakat yang telah ditentukan. Sesuai dengan perintah Allah dalam surat At-Taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*Artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui"*⁶. (QS. At-Taubah: 103)

Salah satu pengawasan oleh pemerintah dalam hal zakat yaitu dapat di lihat dari lahirnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 38 Tahun 1999. Kemudian di Provinsi Riau lahirnya Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat, hal ini menambahkan bahwa potensi zakat bisa

⁶*Ibid*, h. 297.

menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial.

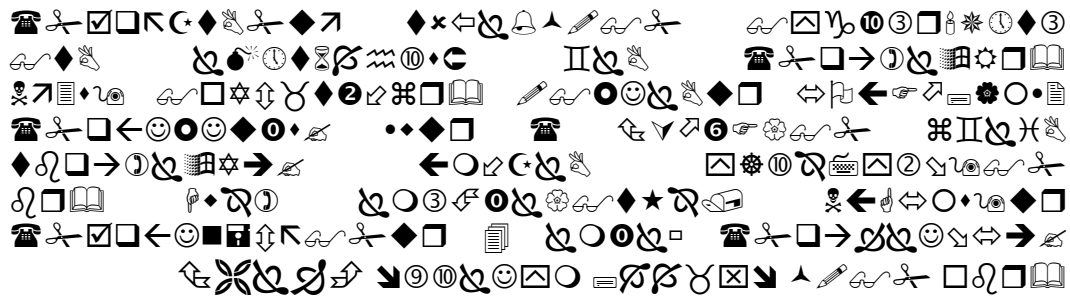
Pada pelaksanaan undang-undang ini dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau pada Bab III pasal dua di jelaskan bahwa : jenis harta yang dikenal Zakat Mal adalah 1. Emas, Perak, dan Uang. 2. Perdagangan dan Perusahaan; 3. Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan; 4. Hasil Pertambangan; 5. Hasil Perternakan 6. Hasil Pendapatan Jasa 7. Rikaaz;.

Dari ketujuh zakat yang telah disebutkan di atas yang kurang di perhatikan oleh masyarakat adalah zakat Penghasilan atau profesi. Padahal zakat penghasilan atau profesi ini sudah didengung-dengungkan dari tahun 2003 yang lalu. Ini terbukti dari lahirnya fatwa MUI No. 3 tahun 2003. Padahal seperti kita ketahui bahwa penghasilan atau profesi sebagai pegawai negeri sipil ini bisa melebihi dari kebutuhan hidup dan mengalahkan hasil pendapatan peternakan dan perikanan.

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik dilakukan sendiri atau bersama-sama orang lain, atau kelompok yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab, misalnya profesi Dokter, Advokat, Dosen, Seniman, dan lain sebagainya⁷.

Zakat gaji dan profesi ini diwajibkan berdasarkan pengembangan konsep tentang harta yang wajib dizakati. Sebagaimana firman Allah Swt:

⁷ Wahbah Zuhayly, *Op.Cit.* h. 275.



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”⁸. (QS. Al-Baqarah 267)

Tetapi pada kenyataannya, pelaksanaan zakat penghasilan ini belum dioptimalkan dengan baik oleh instansi pemerintah. Seperti diprovinsi Riau sendiri hanya pemerintah daerah Kampar lah yang telah menerapkan Zakat Penghasilan ini untuk golongan Pengawai negeri sipil yang langsung dipotong pada pembayaran gaji.

Sementara itu dalam peraturan daerah Pemerintah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat telah dijelaskan pada Bab 1 pasal 1 huruf 23. Unit Pengumpulan Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat dan semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan Zakat, Infak, Shadaqoh, Hibah, Wasiat, Waris, Kafarat dan harta waris orang yang tidak memiliki ahli waris untuk melayani Muzakki yang berada pada Desa/Kelurahan, Instansi-Instansi

⁸ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 47.

Pemerintah Dan Swasta⁹. Jadi dengan sangat jelas bahwa Perda ini sangat jelas mengatur kepada masyarakat baik di Instansi Pemerintah maupun Swasta untuk melaksanakan Zakat baik Zakat Perdagangan maupun Zakat Penghasilan dan membuat UPZ di setiap instansi di lingkungan Pemerintah dan Swasta yang beragama Islam.

Pada instansi pemerintah seperti di lingkungan UIN Suska, pada saat ini belum menerapkan zakat penghasilan ini Pada lingkungan Pegawai Negeri Sipil. Padahal sebenarnya instansi seperti kampus UIN khususnya fakultas syari'ah ini bisa menjadi acuan masyarakat luas sebagai mediator penggerak untuk melaksanakan zakat penghasilan. Karena kampus adalah tempat mahasiswa menuntut ilmu dan sumber inspirasi dan tumpuan masyarakat dalam mengembangkan potensi zakat ini. Dari data yang di peroleh penelitian bahwa potensi zakat bagi Pegawai Negri Sipil di Kota pekanbaru mencapai 6.3 Milyar pertahun¹⁰.

Beberapa sumber yang sangat dipercaya menjelaskan bahwa di UIN khususnya di fakultas syari'ah sebenarnya sudah melakukan hal ini, tetapi belum ada tanggapan dengan usulan bahwa setiap PNS di Lingkungan UIN diwajibkan mengeluarkan zakat profesinya. Jadi sebagian dari dosen membayarkan zakatnya secara personal (sendiri-sendiri), sedangkan yang lainnya tidak melakukan pembayaran zakat karena belum ada peraturan

⁹Peraturan Daerah Provinsi Riau No 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat. h. 3

¹⁰ BAZ Kota Pekanbaru. 2010.

katanya¹¹. padahal kalaulah kita lihat sebenarnya hasil dari PNS ini sudah mewajibkan untuk membayar zakatnya.

Seperti kita ketahui sampai saat ini belum adanya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) baik di UIN Suska maupun di Fakultas Syari'ah. Permasalahan diatas menyebabkan penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh. Bagaimana persepsi dosen Syariah UIN Suska sendiri tentang zakat penghasilan.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, maka penulis memfokuskan pembahasan yaitu pada Persepsi Dosen Syariah UIN Suska tentang zakat penghasilan ditinjau menurut fatwa MUI No.3 Tahun 2003.

C. Rumusan Masalah

Dalam mengarahkan tulisan ini kepada tujuan, penulis akan menguraikan rumusan masalah yang menjadi acuan dalam pembahasan bagi penulis untuk pembahasan selanjutnya. Adapun rumusan masalah dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Bagaimanakah persepsi Dosen Syariah terhadap zakat penghasilan ?
2. Bagaimanakah persepsi Dosen Syariah Terhadap zakat Penghasilan ditinjau menurut Fatwa MUI No.3 Tahun 2003?

¹¹ Wawancara, Kabag Kepegawaian UIN Suska. 06 Mei 2011.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui persepsi Dosen Syariah UIN Suska tentang Zakat Penghasilan.
 - b. Untuk mengetahui Fatwa MUI No.3 Tahun 2003 tentang zakat Penghasilan.
 - c. Untuk mengetahui Persepsi Dosen Syariah UIN Suska terhadap Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 Tentang zakat penghasilan.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Diharapkan menambah khazanah keilmuan dalam melakukan pengelolaan zakat agar lebih profesional dan proporsional. Utamanya bagi pelaku yang terlibat langsung dan kompeten dalam upaya-upaya pemberdayaan zakat.
 - b. Diharapkan bisa menjadi kontribusi positif dalam upaya memecahkan masalah yang melingkupi Pelaksanaan Zakat pada di UIN Suska.
 - c. Dapat dimanfaatkan sebagai informasi tambahan bagi penelitian lain yang meneliti permasalahan zakat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan karya tulis ini, jenis penelitian yang digunakan dilihat dari tempat aktifitasnya adalah Kelapangan (*field research*) yang berlokasi di Kampus Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau. Adapun alasan memilih daerah ini sebagai lokasi penelitian karena menjadi lokasi berlakunya masalah penelitian sebagaimana tersebut di atas, lokasi tersebut mudah dijangkau dan penulis sendiri adalah mahasiswa UIN Suska ini.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah Dosen Fakultas Syariah UIN Suska. Sedangkan objeknya adalah persepsi Dosen Syariah UIN Suska terhadap Zakat penghasilan menurut Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003.

3. Populasi Dan Sampel.

Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah Dosen Syariah UIN Suska. Jadi populasinya adalah 78 orang. Dikarenakan jumlah populasinya terlalu banyak maka penulis mengambil 40 orang dari jumlah populasi untuk dijadikan sampel. Dengan teknik *Purposive Sampling*.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang penulis peroleh langsung dari Dosen Syariah di UIN Suska.
- b. Data skunder yaitu data yang diambil dari buku-buku dan hasil penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan zakat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian ini, penulis melakukan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung ke tempat diadakannya penelitian.
- b. Wawancara, yaitu dengan melakukan Tanya Jawab langsung mengenai permasalahan yang diteliti.
- c. Kuisioner/ Angket, yaitu dengan mengajukan daftar pertanyaan yang ditujukan kepada responden.
- d. Pustaka, penulis menggunakan data yang diambil dari buku-buku, dan dokumen-dokumen yang dapat dijadikan acuan dan berkaitan dengan penelitian ini.

6. Teknik Penulisan

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan metode-metode berikut :

1. Deduktif, yaitu menggambarkan kaedah yang umum yang ada kaitannya dengan penelitian ini, dianalisa dan diambil kesimpulan.
2. Induktif, yaitu menggambarkan kaedah khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
3. Diskriptif, yaitu mengumpulkan data-data yang ada, kemudian dianalisa dengan pendapat yang relevan.

F. Sistematika Penulisan

- Bab I Pendahuluan dalam pembahasan ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II Pada bab ini berisikan tentang Gambaran Umum Fakultas Syariah UIN Suska, Sejarah, Visi dan misi, dan Dosen Fakultas Syariah
- Bab III Tinjauan Teoritis tentang Persepsi dan zakat penghasilan didalamnya mencakup Persepsi: Pengertian persepsi, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Zakat Penghasilan : pengertian zakat penghasilan, Dasar Hukum, dan pendapat ulama tentang zakat penghasilan.
- Bab IV Berisikan Analisis Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 Terhadap Persepsi Dosen Syariah tentang zakat Penghasilan yaitu : Fatwa MUI No3 Tahun 2003, Persepsi Dosen Syariah tentang zakat penghasilan, tinjauan fatwa MUI No 3 Tahun 2003 terhadap persepsi dosen syariah UIN Suska.
- Bab V Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM FAKULTAS SYARIAH UIN SUSKA

A. Sejarah

Pembangunan Nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat Riau merupakan bagian dari rakyat Indonesia. Perkembangan dunia modern akhir abad ke dua puluh atau awal abad ke dua puluh satu, ditandai dengan kemajuan ini akan membawa perubahan-perubahan dalam kehidupan manusia, baik kehidupan politik, ekonomi maupun sosial budaya.

Dalam bidang politik, peraturan kekuasaan dan pengaruh negara-negara maju atas negara-negara dunia ketiga terus berlanjut. Dalam bidang ekonomi, masyarakat kota yang agraris menjadi masyarakat industri dengan menggunakan teknologi modern. Dalam kaitan ini pengaruh negara-negara maju sangat mewarnai ekonomi bangsa. Dalam bidang sosial budaya, pengaruh budaya asing melalui sistem komunikasi dan informasi modern menjarak jaringan-jaringan sosial budaya, sehingga pergeseran nilai masyarakat dalam memandang dunia kehidupan sangat dirasakan oleh setiap orang.

Sebagai dampak negatif dari kondisi tersebut dapat diramalkan bahwa arah kehidupan masyarakat masa mendatang cenderung ke arah materialistis, sekularistis dan individualistis, karena pengaruh keterbukaan yang dinamis dan rasionalis, yang pada akhirnya bermuara kepada pergeseran pandangan terhadap nilai-nilai agama.

Dalam menghadapi perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka peranan para intelektual muslim semakin sangat penting. Mereka harus mampu mengarahkan kemajuan ilmu dan teknologi bernafaskan Islami.

Menyadari kelemahan dan kekurangan akan hal yang demikian maka tokoh agama, pemuka masyarakat dan pemerintah daerah Riau merasa terpanggil untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi yang beridentitas Islam. Ide tersebut menjadi kenyataan dengan usaha membentuk BADAN PELAKSANA AL JAMI'AH AL ISLAMIAH (BAPELA) Riau yang diketuai oleh Datuk Wan Abdurrahman (Wakil Gubernur KDH Tk.I Riau). Sebagai salah satu usaha dari BAPELA adalah pendirian Fakultas Syariah, berdasarkan surat keputusan Menteri Agama No. 79 tahun 1966 tanggal 21 Nopember 1966. Fakultas yang didirikan ini merupakan salah satu Fakultas pada Universitas Islam Riau (UIR) cabang Tembilahan. Pada waktu yang bersamaan dilantiklah Haji Abdul Hamid Sulaiman sebagai Dekan.

Penegerian Fakultas Syariah itu dipersiapkan oleh panitia persiapan penegerian yang dipersiapkan oleh A. Satar Hakim (Bupati KDH Tk. II Indragiri Hilir di Tembilahan). Setelah di negerikan Fakultas Syariah berinduk kepada IAIN Imam Bonjol Padang. Berhubungan sulitnya transportasi dan komunikasi, maka dengan SK Menteri Agama RI No. 99 Tahun 1967 Tanggal 4 September 1967 berpindah induk ke IAIN Sulthan Thaha Syaifudin Jambi. Tapi juga mengalami kesulitan dan kendala tentang administrasi, maka dengan SK Menteri Agama RI No. 36 Tahun 1969 tanggal 5 Mei 1969 berpindah ke

IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sejak diresmikan berdirinya IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru, yaitu tanggal 16 September 1970 yang berdasarkan SK. Menteri Agama RI No. 1994 tahun 1970, Fakultas Syariah Tembilahan resmi berinduk ke IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru.

Semula Fakultas Syariah hanya berstatus Fakultas Muda yaitu sampai Sarjana Muda saja. Dengan jurusan Qadha'. Kemudian melalui SK Menteri Agama RI No. 69 Tahun 1982, tanggal 27 Juli 1982, status Fakultas Syariah ditingkatkan menjadi Fakultas Madya.

Berdasarkan SK Menteri Agama RI tersebut Fakultas Syariah menyelenggarakan perkuliahan tingkat Doktoral Syariah membuka kuliah ditingkat Doktoral dengan jurusan Qadha'. Hal ini terus berlangsung sampai dimulai Sistem Kredit Semester (SKS) pada tahun ajaran 1984/1985. Pada saat itu Fakultas Syariah sudah berkembang menjadi dua jurusan yaitu Peradilan Agama (PA) dan jurusan Perdata/Pidana Islam (PPI).

Tahun ajaran 1989/1990 terdapat pula perubahan dan penambahan jurusan, yaitu Peradilan Agama (PA), Jurusan Perbandingan Mazhab (PM) sebagai jurusan baru, dan jurusan Mu'amalah Jinayah (MJ) sebagai ganti dari jurusan Perdata dan Pidana Islam. Enam tahun kemudian, tepatnya pada tahun ajaran 1995/1996 terjadi lagi perubahan jurusan Peradilan Agama (PA) berubah nama dengan Ahwal al-Syakhshiyah (AS), jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH), jurusan Muamalah Jinayah dimekarkan menjadi

dua jurusan yaitu jurusan Muamalah (M) dan jurusan Jinayah Siyasah (JS).

Kemudian pada tahun ajaran 1997/1998 berganti nama lagi menjadi :

- Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah yang semula disingkat AS menjadi AH.
- Jurusan Muamalah tidak ada perubahan.
- Jurusan Perbandingan Mazhab Hukum (PMH) menjadi Perbandingan Hukum dan Mazhab (PHM)
- Jurusan Jinayah Siyasah (JS) menjadi Siyasah Jinayah (SJ)

Mulai tahun akademi 1998/1999 dibuka :

- Jurusan Manajemen (MEN)
- Program D.III Manajemen Perusahaan (MP)

Setelah berjalan beberapa tahun sesuai dengan tuntutan perubahan status IAIN menjadi UIN, maka pada tahun 2002 / 2003 jurusan Manajemen (Men) dan Program D3 Manegement Perusahaan (MP) menjadi fakultas tersendiri yang diberi nama Fakultas Ekonomi. Dengan dimulai sejak tahun itu, maka pelaksana administrasi dan akademik terpisah dari Fakultas Syariah.

Tetapi dengan semakin besarnya tuntutan perubahan, maka mulai tahun akademik 2002 / 2003 Fakultas Syariah membuka jurusan baru yaitu Jurusan Ekonomi Islam (EI) Program Studi Ekonomi Perbankan S1 yang lebih berbasis syariah, yaitu dengan SK Menteri Agama RI No. E/16/1998. Kemudian pada tahun akademik 2003/2004 Fakultas Syariah membuka Program Studi Diploma Tiga Perbankan Syariah berdasarkan Hasil Rapat senat Universitas dan dilanjutkan dengan Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor

:Dj.I/178/2007 Tanggal 20 April 2007 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Sejalan dengan visi UIN Suska Riau serta kebutuhan akan ahli-ahli hukum yang professional saat ini, maka berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/284/2007, tanggal 15 Agustus 2007 telah berdiri Program Studi Ilmu Hukum dengan konsentrasi Hukum Bisnis dan Hukum Tata Negara yang berada di bawah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, sebagaimana tindak lanjut dari Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2005, bahwa diantara Fakultas yang ada di lingkungan UIN Suska Riau adalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

B. Visi dan Misi

Dengan Perubahan status Institut Agama Islam Negeri Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau yang ditandai dengan keluarnya Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2005 tertanggal 4 Januari 2005 dan disusul dengan Peraturan Menti Agama Nomor 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau, dengan paradigma Integralisme Ilmu Pengetahuan Islam, maka Fakultas Syariah diubah nama menjadi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Penggabungan ilmu-ilmu syariah dan ilmu hukum dalam satu fakultas merupakan suatu tuntutan zaman baik

dilihat dari aspek filosofis akademik, maupun dilihat dari aspek sosiologis dan ekonomis.

Secara filosofis, perubahan nama Fakultas Syariah menjadi Fakultas Syariah dan Ilmu hukum, berkaitan dengan kenyataan munculnya kesadaran dan pencerahan baru di dunia Islam terhadap paradigma pendidikan modern. Dari aspek sosiologis, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, mau tidak mau berhadapan dengan berbagai tantangan dari berbagai arah sebagai akibat dari globalisasi. Dari aspek sosial ekonomi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, juga dihadapkan pada tantangan Otonomi Perguruan Tinggi yang sudah mulai diterapkan di beberapa perguruan tinggi di Indonesia dalam bentuk BHMN. Departemen Agama sedang mempersiapkan model otonomi melalui bentuk lain yaitu Badan Layanan Umum (BLU).

Untuk mencapai keinginan tersebut, maka disusunlah Visi dan Misi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau sebagai berikut :

Visi

Mewujudkan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau sebagai lembaga pendidikan tinggi utama dan berkualitas yang mengembangkan Hukum Islam, Ekonomi Islam dan Pranata Sosial secara integral pada tahun 2013.

Misi

- Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas secara akademik dan professional dalam bidang hukum, ekonomi Islam dan pranata sosial secara integral.
- Melaksanakan penelitian dan kajian ilmiah dalam bidang hukum, ekonomi Islam dan pranata sosial dengan paradigma Islami.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara integral dengan menggunakan paradigma Islami.
- Menyiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi dalam bidang hukum, ekonomi dan pranata sosial Islam.¹

C. Dosen Syariah UIN Suska

1. Pendidikan

Dalam menunjang sarana dan mutu pendidikan di Fakultas Syariah UIN Suska Riau maka tenaga Pengajar yang di butuhkan adalah tenaga dosen yang memiliki nilai kepribadian dan pendidikan yang baik.

Dosen Fakultas Syariah adalah dosen pengajar tetap di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau dan dosen tidak tetap. Dari data yang diperoleh bahwa tingkat pendidikan terakhir dosen Fakultas Syariah UIN Suska bervariasi terdapat beberapa dosen yang bergelar Profesor,

¹ Buku Panduan Akademik UIN Suska 2010

Doktoral (S3), Master (S2), Sarjana (S1). Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel. 01

Tingkat Pendidikan Dosen Syariah

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Profesor	5
2	S3	6
3	S2	64
4	S1	2

Data diperoleh dari buku Panduan dan informasi akademik 2010-2011

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat pendidikan dosen Syariah cukup bagus bahwa rata-rata tingkat pendidikan Profesor sebanyak 5 Orang, Doktoral sebanyak 6 Orang, Magister Sebanyak 63 orang dan yang masih Sarjana sebanyak 3 orang.

2. Keahlian Dosen Syariah

Sedangkan meningkatkan sumber daya manusia di dalam sistem pengajaran dosen fakultas syariah memiliki berbagai macam keahlian di dalam hukum Islam, Hukum Positif, Ekonomi dan Politik.

Dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 02

Tingkat Keahlian Dosen Syariah UIN Suska

NO	KEAHLIAN	JUMLAH
1	Filsafat Hukum Islam	3
2	Ushul Fiqh	3
3	Fiqh Munakahat	3
4	Fiqh	3
5	Fiqh Muamalah	4
6	Fiqh Mawaris	2
7	Peradilan Islam	1
8	Dirasah Islamiah	1
9	Fiqh Jinayah	2
10	Tafsir	2
11	Ekonomi Islam	2
12	Qawaid Fiqhiyah	1
13	Tarikh Tasyri'	1
14	Akhlak Tasawuf	1
15	Ilmu Falak	2
16	Hukum Perdata	3
17	Hukum Pidana	1
18	Sosiologi Hukum Islam	2
19	Bahasa Indonesia	1
20	Ulumul Hadis	3
21	Fiqh Muqarin	1
22	Fiqh Muqarin fil Muamalah	1
23	Muqaranah Mazahib Fil Muamalah	1
24	Sejarah Kebudayaan Islam	1
25	Peradilan Agama di Indonesia	1
26	Hukum Islam di Indonesia	1

27	Ilmu Alamiah Dasar	1
28	Ulumul Qur'an	2
29	Tafsir Ahkam	1
30	Motodologi Hukum Islam	2
31	Hukum Acara	2
32	Fiqh Siyasah	1
33	Sejarah Islam Asia Tenggara	1
34	Filsafat Hukum	1
35	Masail Al-Fiqhiyyah	1
36	Pengantar Ilmu Hukum	1
37	Kriminologi	1
38	Fiqh Kontemporer	2
39	Muqaranah Mazahib fil Fiqh	1
40	Muqaranah Mazahib fil Ushul	1
41	Hadis	2

Data diperoleh dari buku Panduan Informasi dan Akademik 2010/2011

BAB III
TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERSEPSI DAN ZAKAT
PENGHASILAN

A. Persepsi

Sejak individu dilahirkan, sejak itu pula individu secara langsung berhubungan dengan dunia luar. Individu secara langsung menerima stimulus atau rangsang dari luar disamping dari dalam dirinya sendiri. Individu mengenali dunia dengan menggunakan alat inderanya. Melalui stimulus yang diterimanya, individu akan mengalami persepsi. Persepsi merupakan suatu proses yang di dahului oleh penginderaan, yaitu merupakan proses berujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat reseptornya. Stimulus yang diteruskan ke pusat susunan saraf yaitu otak, dan terjadilah proses psikologis, sehingga individu mengalami persepsi. Ada beberapa syarat terjadinya persepsi yaitu, adanya obyek persepsi, alat indera atau reseptor yang merupakan alat untuk menerima stimulus, dan adanya perhatian.

1. Pengertian Persepsi

Membahas istilah persepsi akan dijumpai banyak batasan atau definisi secara etimologi persepsi diartikan tanggapan (penerimaan) langsung dari

suatu serapan dan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui indranya¹⁵.

tentang persepsi yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain oleh : Jalaludin Rahmat (2003:51) mengemukakan pendapatnya bahwa persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi setiap individu dapat sangat berbeda walaupun yang diamati benar-benar sama. Hal ini menurut Krech dkk, karena setiap individu dalam menghayati atau mengamati sesuatu obyek sesuai dengan berbagai faktor yang determinan yang berkaitan dengan individu tersebut. Ada empat faktor determinan yang berkaitan dengan persepsi seseorang individu yaitu, lingkungan fisik dan sosial, struktural jasmaniah, kebutuhan dan tujuan hidup, pengalaman masa lampau.

Menurut Desideranto dalam Psikologi Komunikasi Jalaluddin Rahmat (2003 : 16) persepsi adalah penafsiran suatu obyek, peristiwa atau informasi yang dilandasi oleh pengalaman hidup seseorang yang melakukan penafsiran itu. Dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa persepsi adalah hasil pikiran seseorang dari situasi tertentu. Muhyadi (1991:233) mengemukakan bahwa persepsi adalah proses stimulus dari lingkungannya dan kemudian mengorganisasikan serta menafsirkan atau suatu proses dimana seseorang

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), cet. Ke-9, h.759

mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan atau ungkapan indranya agar memilih makna dalam konteks lingkungannya. Sarwono (1993:238) mengartikan persepsi merupakan proses yang digunakan oleh seseorang individu untuk menilai keangkuhan pendapatnya sendiri dan kekuatan dari kemampuan-kemampuannya sendiri dalam hubungannya dengan pendapat-pendapat dan kemampuan orang lain.

Pengertian persepsi menurut Bimo Walgito adalah pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktifitas integrated dalam diri individu¹⁶. Dari beberapa pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa persepsi adalah kecakapan untuk melihat, memahami kemudian menafsirkan suatu stimulus sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan menghasilkan penafsiran. Selain itu persepsi merupakan pengalaman terdahulu yang sering muncul dan menjadi suatu kebiasaan.

Hal tersebut dibarengi adanya pernyataan populer bahwa “manusia adalah korban kebiasaan” karena 90 % dari pengalaman sensoris merupakan hal yang sehari-hari dipersepsi dengan kebiasaan yang didasarkan pada pengalaman terdahulu yang diulang-ulang. Sehingga mempersepsi situasi sekarang tidak lepas dari adanya stimulus terdahulu. Berbagai batasan tentang persepsi di atas, dapat dijelaskan bahwa persepsi adalah sebagai proses mental pada individu dalam usahanya mengenal sesuatu yang

¹⁶Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: Bima Aksara, 1984), h. 23

meliputi aktifitas mengolah suatu stimulus yang ditangkap indera dari suatu obyek, sehingga di dapat pengertian dan pemahaman tentang stimulus tersebut. Persepsi merupakan dinamika yang terjadi dalam diri individu disaat ia menerima stimulus dari lingkungannya. Proses persepsi individu akan mengadakan penyeleksian apakah stimulus itu berguna atau tidak baginya, serta menentukan apa yang terbaik untuk dilakukan.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Persepsi seseorang terhadap suatu objek yang sama, dapat melahirkan tanggapan berbeda, secara umum dapt dikatakan ada tiga faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang:

Pertama, diri orang yang bersangkutan. Apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya, ia dipengaruhi oleh karakteristik individual yang turut berpengaruh seperti motif, sikap, kepentingan, minat, pengalaman, dan harapannya. Motif sudah barang tentu berkaitan dengan pemuasan kebutuhan dan intensitas motif itu dipengaruhi oleh mendesak tidaknya pemuasan kebutuhan tersebut. Setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda terhadap sesuatu karena motif pemuasan kebutuhan juga berbeda. Kepentingan seseorang pun biasanya akan mempengaruhi persepsinya. Pengalaman turut mempengaruhi persepsi seseorang. Hal-hal tertentu yang sudah berulang kali dialami seseorang akan dipandang dengan cara yang berbeda dari cara pandang orang lain yang belum pernah mengalami.

Berkaitan dengan harapan seseorang pun turut mempengaruhi persepsinya, bahkan harapan itu begitu mewarnai persepsi seseorang hingga apa yang sesungguhnya ia lihat sering diinterpretasikan lain supaya sesuai dengan apa yang diharapkannya.¹⁷

Kedua, yang dikemukakan adalah mengenai sasaran persepsi tersebut. Sasaran itu mungkin berupa orang, benda atau peristiwa, sifat-sifat sasaran itu biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya, dengan kata lain, gerakan, suara, ukuran, tindak tanduk dan ciri-ciri lain dari sasaran persepsi turut menentukan cara pandang orang yang melihatnya.

Ketiga, adalah faktor situasi, persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti dalam situasi mana persepsi itu timbul perlu pula mendapat perhatian, situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam penumbuhan persepsi seseorang.¹⁸

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang sangat tergantung pada aspek kepribadian, seperti sikap, motif, kepentingan, minat, harapan dan sebagainya disamping faktor situasi dan sasaran persepsi. Sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk terjadinya perbedaan persepsinya merupakan hal yang wajar.

¹⁷Sondang P. Siagian, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, (Jakarta: Reneka Cipta, 1995), h. 101-102

¹⁸*Ibid.*, h. 105

B. Zakat Penghasilan

1. Pengertian Zakat Penghasilan

Untuk lebih memudahkan dalam memahami zakat penghasilan secara mendalam, terlebih dahulu dikemukakan pengertian zakat menurut bahasa dan istilah Syara' yang dikemukakan oleh fuqoha.

1. Zakat secara bahasa

Menurut Abu Lu'is Al-Ma'lifi, Zakat adalah :

النماء و الصلح و الصدقة و الطهارة و الزائد و الخير و الفضل

Artinya : zakat berarti tumbuh, sedekah, bertambah, baik dan berlebihan¹⁹.

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri zakat adalah :

الطهيرة والنماء

Artinya : Suci dan tumbuh (berkembang)²⁰.

Dan Abu Bakar Al-husaini Mengatakan :

ير

Artinya : Zakat berarti subur, berkah, dan banyak kebaikan²¹.

¹⁹ Abu Luis Al-Ma'lifi, *Al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-A'lam*, (Dar al-Masyriq: Asy-Syarqiyah, 1925), h. 303

²⁰ Abdurrahman Al-Jziry, *Al-Fiqhu ala Mazhib al-Arba'ah*, (Beirut : Dar al-Fikri, 1411/H 1990 M), Juz 1, h. 302

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa zakat mempunyai beberapa pengertian, seperti yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas. Namun yang jelas dapat dikeluarkan zakat, maka harta diharapkan dapat bertambah dan berkembang dimasa mendatang. Selain itu zakat juga mendatangkan kebaikan kepada orang lain dan bagi yang mengeluarkan zakat.

Hasby as-Siddiqy telah mengemukakan bahwa zakat dinamakan dengan pengeluaran harta karena ia merupakan suatu sebab yang diharapkan dapat mendatangkan kesuburan, kebaikan, kesucian dan keberkatan. Dan merupakan cara untuk mensucikan jiwa dan dosa²².

Menurut Afzalurrahman, zakat berarti menumbuh-kembangkan, memurnikan, mensucikan, memperbaiki, yaitu memperbaiki diri setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat²³.

Jadi zakat membentuk dua fungsi penting, *pertama*, zakat akan mensucikan jiwa orang yang membayarnya dari sifat serakah, dan bahkan mendorong untuk berderma dan membelanjakan harta untuk hal-hal yang baik. *Kedua*, menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik. Dan mencegah segala pengaruh yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi

²¹Imam Taqiyuddin Abi Bakar Bin Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar*, (Surabaya : syirkat an-Nur al-Ilmiyah), h. 172

²² Hasby As-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : Pustaka Rizki, 1999), Cet, III, h. 8

²³ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih Bahasa : Nastangin S, (Yogyakarta : Dana Bhakti Waqof, 1996), Jilid III, h.235

dan mendorong tercapainya kemajuan ekonomi. Dan dari segi bahasa, zakat merupakan masdar dari kata yang berarti :

ما تقدّمه من مالك لتطهيره

Artinya : “Sesuatu yang kamu berikan sebagian hartamu supaya kamu membersihkan hartamu itu denganya”²⁴.

Yusuf Al-Qardhawy mengatakan bahwa dari sudut bahasa zakat berarti suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Semua makna tersebut digunakan dalam kata zakat dalam Al-Quran dan Al-Hadits²⁵.

Zakat adalah ibadah maliyah ijtimaiah dan merupakan wadah yang sangat potensial untuk dijadikan sumber dana bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Islam. Hal ini disebabkan zakat dalam dimensi ibadah mempunyai dimensi rohani, yang menuntut dikeluarkannya sebagian harta, yang sangat mengidentifikasikan kepentingan sosial.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa zakat mempunyai makna suci, tumbuh dan berkembang, berkah dan terpuji. Dan juga dapat dipahami bahwa seseorang yang telah mempunyai kelebihan harta diwajibkan mengeluarkan zakatnya sebagai pembersih harta dari unsur-unsur kotor. Karena pada dasarnya setiap harta yang dimiliki oleh seseorang itu

²⁴ Abu Luis al-Ma’lifi, op. Cit, h. 303

²⁵ Yusuf al-Qardawy, *Hukum Zakat*, Alih Bahasa ; Salman Harun, (Bogor : Lintera Antar Nusa, 1996), h. 34

didalamnya ada hak orang lain, dan itu harus diberikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya.

Dan zakat juga merupakan pemberian yang mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan sekaligus merupakan ajang edukatif yang sangat efisien di dalam membina kepribadian muslim untuk menjadi manusia yang bermoral. Dan sekaligus merupakan satu upaya dalam menciptakan suatu sosial masyarakat yang ideal.

1. Zakat menurut Istilah Syar'i

Menurut Sayyid Sabiq, zakat menurut istilah adalah

اسم لما يخرج من حق الله الى الفقراء

Artinya : Nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada faqir miskin²⁶.

Pengertian zakat yang dikemukakan tokoh di atas menjelaskan bahwa zakat itu adalah perpindahan suatu hak milik dari seseorang kepada orang lain sesuai dengan ketentuan syara' sampai nisab dan haul. Karena itu diwajibkan kepada mereka yang memiliki Harta yang telah mencapai nisab dan haul untuk mengeluarkan zakatnya.

²⁶ Sayyid Sabiq. *Fiqh as-sunnah*, Alih Bahasa : Mahyudin Syaf, (Bandung : Al-Ma'arif, 1978), Cet. 1, h. 5

Menurut hasby As-Siddiqy, zakat menurut istilah adalah *sebagian harta orang kaya yang telah ditentukan oleh agama kadarnya dan nisabnya*²⁷.

Yusuf Al-Qardhwy di dalam kitabnya *Fiqh Az-Zakah*, yang diterjemahkan oleh Harun Salman bahwa zakat menurut Allah Ta'ala untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak²⁸.

Dari pengertian yang dikemukakan para ahli diatas, maka dapat diambil suatu pengertian bahwa zakat itu adalah *menyisihkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syara', baik waktu maupun jumlahnya*.

2. Pengertian Zakat Penghasilan

Dari beberapa pengertian yang terdapat pada kata zakat dan penghasilan, maka munculah beberapa pengertian zakat penghasilan. Di dalam himpunan putusan tarjih muhammadiyah dikatakan bahwa zakat penghasilan adalah *zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil (uang yang relative banyak dengan cara yang mudah), baik melalui keahlian tertentu atau tidak*.

Sedangkan menurut ahmad husain di dalam kitabnya yang berjudul *Zakat Menurut Sunnah Dan Zakat Model Baru* menyebutkan bahwa zakat penghasilan adalah *zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha orang*

²⁷ Hasby as-Siddqy, *Beberapa Permasalahn zakat*, (Jakarta : Tinta Mas, 1976), h. 31

²⁸ Yusuf al-Qardhwy, *Op. Cit.* h. 34

*muslim yang mempunyai keahlian dibidangnya seperti insinyur, ahli bangunan, dokter, pegawai dan lain-lainnya*²⁹.

Sedangkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 Tahun 2003 yang dimaksud dengan “Penghasilan” adalah *Setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jaa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya*³⁰.

Dari definisi zakat profesi yang dikemukakan oleh beberapa ahli fiqh penulis dapat menyimpulkan bahwa zakat penghasilan adalah *zakat yang dikeluarkan dari penghasilan, gaji, jasa, Upah atau Honorarium yang diperoleh dengan cara halal apabila telah sampai nisab*.

2. Dasar Hukum Zakat Penghasilan.

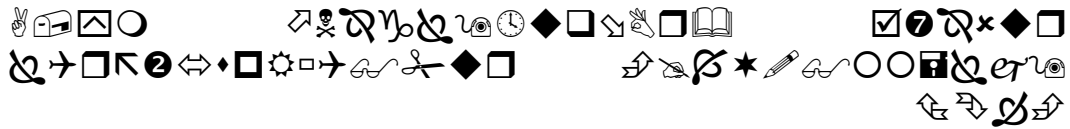
Menurut dalil Al-Quran, semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut apabila telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya, hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum, yaitu :

²⁹ Ahmad Husain, *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1996), Cet. 1, h. 72.

³⁰ Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Fatwa-Fatwa Tentang Zakat (Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003)*, (Jakarta : Qultum Media, 2008) Cet-1. H. 12

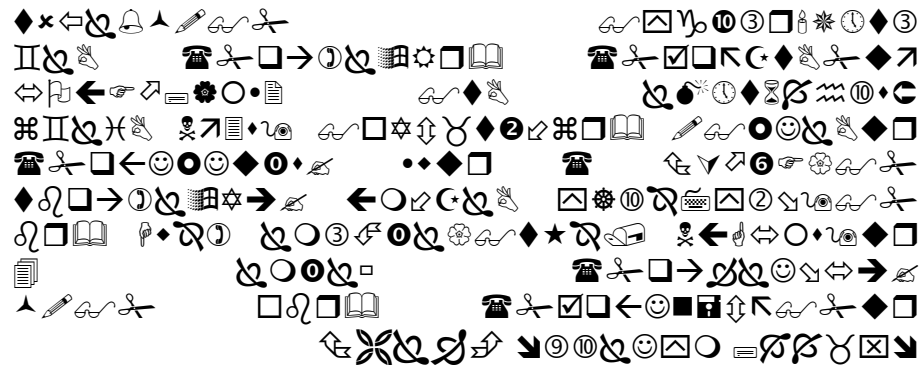
a. Dalil Al-Quran

1. Surat adz-Dzariat ayat 19 :



Artinya : “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”³¹. (QS. Adz-Dzariat: 19).

2. Surat Al-Baqarah ayat 267 :



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”³². (QS. Al-Baqarah: 267).

Kata “ “ adalah termasuk kata yang mengandung pengertian yang

umum, yang artinya “apa saja” jadi

artinya “ sebagian dari hasil

(apa saja) yang kamu usahakan yang baik-baik”. Maka jelaslah, bahwa

³¹ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Magfirah Pustaka, 2006), Cet ke 1, h. 196.

³² *Ibid.*

Dari surat Al-Baqarah ayat 267 diatas maka timbullah berbagai macam pendapat oelh para ulama”

1. Menurut Ibnu Katsir bahwa ayat tersebut diatas mengandung perintah kepada orang yang beriman agar menginfakkan sebagian hartanya. Dan lafaz **من طيبات ما كسبتم** bermakna sebagian harta yang baik dan melarang menafkahkan dengan harta yang jelek. Karena Allah SWT maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik pula
2. Menurut Muhammad Mahmud Hijazi bahwa lafaz **ما كسبتم** adalah sebagai *maf'ul bih* yang artinya apa yang kamu usahakan sendiri. Yang harus dinafkahkan itu berupa tumbuh-tumbuhan, biji-bijian,

³³ Masifuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta : Toko Gunung Agung, 1997) cet- 10, h.

rikaz atau berupa usaha dagang, perusahaan dan usaha-usaha dagang, perusahaan dan usaha-usaha yang lainnya.

3. Jalaludin bin Ahmad Al-Mahally berpendapat :

ما كسبتم من المآل والطيبات

Artinya : Yang dimaksud yaitu dari harta yang baik

4. Menurut Sayyid Qutb bahwa secara umum yaitu untuk semua mukmin sepanjang waktu dan setiap generasi. Mencakup semua harta yang sampai ketangan manusia dari yang halal lagi baik.

5. Dan Masjfuk Zuhdi juga berpendapat kata mengandung pengertian yang umum yaitu apa saja, jadi adalah sebagian dari hasil (apa saja) yang kamu usahakan yang baik-baik seperti gaji, honorarium, dan lain-lainnya. Semua itu terkena wajib zakat asal penghasilan itu telah melebihi pokok hidup keluarganya yang berupa sandang, pangan, dan papan dan juga alat-alat rumah tangga, kendaraan dan lain-lain

Dari penjelasan ayat diatas dapat dipahami semua penghasilan (gaji, Honorarium dll) terkena wajib zakat dengan ketentuan penghasilan tersebut telah melebihi kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya. Dan uga yang jelas lagi bahwa harta tersebut telah mencapai nisab yaitu 93,6 gram emas.

3. Pendapat Ulama Tentang Zakat Penghasilan

Masalah zakat profesi sejak kemunculannya sampai saat ini tidak henti-hentinya diperbincangkan para ulama. Pada dasarnya perbincangan itu berangkat dari perbedaan persepsi yang muncul tentang status zakat itu sendiri, yaitu (1) Zakat adalah ibadah mahdhah, (2) Zakat bukan ibadah mahdhah melainkan muamalah atau ‘adat.

1. Zakat Ibadah Mahdhah

Yang berpendapat bahwa zakat itu termasuk ibadah mahdhah berargumentasi antara lain:

a. Zakat termasuk rukun Islam,

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ تَأْتِرَ الرَّأْسَ يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّكَاعَةُ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ فَأَذْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ .

Artinya: “Dari Thalhah bin Ubaidullah, ia berkata, “Seorang lelaki penduduk Najd datang kepada Rasulullah saw. dengan rambut kusut. Terdengar keras suaranya, tapi tidak difahami apa yang dikatakannya, sehingga ketika mendekat. Ternyata ia bertanya tentang Islam. Rasulullah saw. menjawab, ‘Lima salat sehari semalam.’ Ia bertanya, ‘Apakah bagiku ada kewajiban yang lainnya’ Beliau menjawab, ‘Tidak ada, kecuali kamu hendak mengerjakan yang sunat’ Rasulullah bersabda, ‘Dan saum Ramadhan’ Ia bertanya, ‘Apakah bagiku ada kewajiban yang lainnya’ Beliau menjawab, ‘Tidak ada, kecuali kamu hendak mengerjakan yang sunat’ Selanjutnya Rasulullah saw. menerangkan kepadanya tentang kewajiban zakat. Ia bertanya, ‘Apakah bagiku ada kewajiban yang lainnya’ Beliau menjawab, ‘Tidak ada, kecuali kamu hendak mengerjakan yang sunat’.” Thalhah berkata, “Orang itu pergi seraya mengatakan, ‘Demi Allah, aku tidak akan menambah dan mengurangi ketentuan ini.’ Rasulullah saw. bersabda, “Berbahagialah dia jika benar”. (H.r. Al-Bukhari).

Jawaban Rasulullah saw.: “tidak, kecuali engkau hendak mengerjakan sunat”. Ini artinya zakat telah diterangkan secara rinci dan jelas sehingga orang itu bertanya tentang kewajiban zakat lainnya.

- a. Zakat di dalam Alquran penyebutannya seringkali digandengkan dengan salat tanpa pemisahan hukumnya, antara lain:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”*³⁴. (QS. Al-Baqarah:43)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ .

³⁴ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 47

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati³⁵”i. (QS. Al-Baqarah: 277)

Pada penyebutan itu tidak ditemukan qarinah (indikator) yang memalingkan tekanan hukum zakat dan dibedakannya dari salat.

Ayat-ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa kedudukan zakat dan salat sama-sama ibadah mahdhah. Itu sebabnya para ulama menetapkan ta’rif sebagai berikut :

إِعْطَاءُ جُزْءٍ مَّخْصُوصٍ مِنْ مَّالٍ مَّخْصُوصٍ بِوَضْعٍ مَّخْصُوصٍ لِمُسْتَحِقِّهِ.

Mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang khusus dengan ketentuan yang khusus bagi mustahiknya.

Definisi di atas menunjukkan bahwa aturan zakat itu telah ditentukan oleh Islam, baik harta yang wajib dizakati, persentasenya, nisabnya dan juga mustahiqnya. Kita tidak punya otoritas untuk menambah atau mengurangi aturan yang telah ditentukan itu. Sebagai perbandingan, seseorang yang mempunyai emas sebagai perhiasan wajib mengeluarkan zakatnya, walaupun hanya seberat satu gram. Sedangkan yang mempunyai kuda tidak dituntut mengeluarkan zakat, walaupun harga kuda lebih mahal daripada satu gram emas. Demikian pula halnya, orang kafir yang fakir tidak boleh diberi zakat

³⁵ *Ibid*, h. 47

sekalipun ia tetangga atau sangat membutuhkan. Sedangkan amilin sekalipun ia kaya boleh menerima zakat.

Selain itu, banyak jenis harta yang di zaman Nabi saw. sudah ada dan sampai sekarang tetap ada, tapi tidak kita temukan ketentuan zakatnya, misalnya: (a) Mutiara, marjan (permata), baik dulu maupun sekarang nilai atau harganya sudah lebih mahal daripada emas dan perak yang ada ketentuan zakatnya, (b) Binatang seperti kuda, keledai dan ayam, sudah ada dan dipelihara, semuanya berbeda dengan unta, sapi dan kambing yang ada ketentuan zakatnya.

Berdasarkan persepsi ini, maka zakat profesi tidak disyariatkan. Dengan perkataan lain, pendapatan profesi tidak terkena zakat.

2. Zakat Bagian dari Mu'amalah

Sebagian ulama menyatakan bahwa zakat itu sebenarnya bukan masalah ta'abudi, bahkan lebih dekat kepada mu'amalah atau adat, sehingga berlaku qiyas (analogi), yaitu menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dalilnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan dalil karena ada persamaan *'illat* (penyebab berlakunya hukum) antara kedua kejadian atau peristiwa itu. Misalnya hukum minum bir (disebut *far'un*) sama dengan hukum minum khamar

(disebut aslun), yaitu haram (disebut hukum asal), karena keduanya sama-sama memabukan (disebut ilat hukum).

Berdasarkan qiyas tersebut ketentuan zakat tidak terbatas atas harta-harta tertentu yang ada di zaman Rasul saja, dan berlaku pula untuk penghasilan seperti halnya gaji, profesi atau sewaan gedung-gedung yang hasilnya melebihi nisab zakat pertanian. Karena menurut mereka, yang dianggap '*illah* (penyebab berlakunya hukum) dalam zakat itu adalah *an-nama'u* (harta yang berkembang) sesuai dengan arti zakat itu sendiri. Paling tidak demikian pandangan Syekh Dr. Yusuf Qordhawi. Lebih dari itu beliau mengatakan bahwa masalah zakat itu lebih tepat ditempatkan dalam fiqih *mali* (kehartaan) dan *ijtima'i* (kemasyarakatan), bukan pada bab ibadah *mahdhah* seperti salat dan shaum.

3. Argumentasi Zakat Profesi Disyari'atkan

Menurut para ulama masa kini, antara lain Dr. Muhamad Abu Zahrah, Dr. Abdurrahman Hasan, Dr. Abdul Wahab Khallaf, Dr. Yusuf al-Qardhawi dan Dr. Wahbah al-Zuhaili, jasa-jasa tersebut di atas tidak terlepas dari kewajiban zakat, berdasarkan pemahaman terhadap keumuman makna yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis berikut:

1. Surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أُخْرَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, nafakahkanlah sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...”³⁶ (QS. Al-Baqarah : 267)

Ayat tersebut berlaku umum meliputi hasil usaha manusia yang diperoleh secara halal yang dikenal pada setiap kurun waktu.

2. Surat At-Taubah ayat : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka ...”³⁷ (QS. At-Taubah ayat: 103)

Hadis-hadis Rasul tentang zakat atas harta penghasilan, antara lain

a. Dari Abu Musa al-Asy’ari, dari Nabi saw., beliau bersabda:

عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يَعْمَلْ بِيَدِهِ فَيَنْفَعْ
نَفْسَهُ وَيَصَدَّقُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يُعِينُ دَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ
يَجِدْ قَالَ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ

Artinya: “Setiap muslim wajib mengeluarkan zakat (shadaqah). Mereka bertanya, ‘Hai Nabi Allah, bagaimana jika ia tidak punya?’ Nabi menjawab, ‘Hendaklah ia bekerja dengan tenaganya. Maka akan memberi manfaat untuk dirinya dan dapat mengeluarkan zakat.’ Mereka bertanya

³⁶ Ibid. h. 46

³⁷ Ibid. h. 203

lagi, 'Bagaimana jika ia tidak bisa?' Nabi menjawab, 'Menolong orang yang membutuhkan lagi menderita' Mereka bertanya lagi, 'Bagaimana jika ia tidak bisa?' Nabi menjawab, 'berbuat baiklah dan menahan diri dari kejahatan, karena hal itu menjadi shadaqah baginya " (HR. Al-Bukhari). Kitab az-Zakah, bab 'Ala kulli Muslim shadaqah, Shahih al-Bukhari, II:143

b. Dari Ibnu Umar

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ

Artinya: "Rasulullah s.a.w. bersabda, "Siapa yang memperoleh kekayaan maka tidak ada kewajiban zakatnya sampai lewat setahun di sisi Tuhannya." (HR. Al-Tirmidzi), Sunan al-Tirmidzi syarh Ibn al-'Arabi, III:125-126.

Atsar (fatwa) para sahabat dan tabi'in, antara lain

1. Ibnu Abbas

Abu Ubaid meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seorang laki-laki yang memperoleh penghasilan. Kata Ibnu Abbas, يُزَكِّيهِ يَوْمَ يَسْتَفِيدُهُ, "Ia mengeluarkan zakatnya pada hari memperolehnya." Lihat, *Al-Amwal*, hal. 413

Demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dari Ibnu Abbas (*al-Mushannaf*, III:160)

2. Ibnu Mas'ud

Abu Ubaid meriwayatkan pula dari Hubairah bin Yaryam,

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُعْطِينَا الْعُطَاءَ فِي زُبُلٍ صِغَارٍ ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُ

Artinya : Abdullah bin Mas'ud memberikan kepada kami keranjang-keranjang kecil kemudian menarik zakatnya. Lihat, Al-Amwal, hal. 412

3. Mu'awiyah

Imam Malik meriwayatkan dari Ibnu Syihab bahwa orang yang pertama kali mengenakan zakat dari pemberian adalah Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Lihat, *Al-Muwatha ma'a al-Muntaqa*, II:95

Syekh al-Qardhawi berkata, “Barangkali yang ia maksudkan adalah orang yang pertama mengenakan zakat atas pemberian dari khalifah, karena sebelumnya sudah ada yang mengenakan zakat atas pemberian yaitu Ibnu Mas'ud sebagaimana sudah kita jelaskan. Atau barangkali dia belum mendengar perbuatan Ibnu Mas'ud, karena Ibnu Mas'ud berada di Kufah, sedangkan Ibnu Syihab berada di Madinah. Yang jelas adalah bahwa Mu'awiyah mengenakan zakat atas pemberian menurut ukuran yang berlaku dalam negara Islam, karena ia adalah khalifah dan penguasa umat Islam. Dan yang jelas adalah bahwa zaman Mu'awiyah penuh dengan kumpulan para sahabat yang terhormat, yang apabila Mu'awiyah melanggar hadis Nabi atau ijmak

yang dapat dipertanggungjawabkan para sahabat tidak begitu saja akan mau diam.

d. Umar bin Abdul Aziz (Tabi'in)

Abu Ubaid menyebutkan

أَنَّهُ كَانَ إِذَا أُعْطِيَ الرَّجُلَ عَمَلَتَهُ أَخَذَ مِنْهَا الزَّكَاةَ، وَإِذَا رَدَّ الْمَظَالِمَ مِنْهَا الزَّكَاةَ، وَكَانَ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ مِنَ الْأَعْطِيَّةِ إِذَا خُرِجَتْ لِأَصْحَابِهَا

Artinya : bahwa bila Umar bin Abdul Aziz memberikan gaji seseorang ia memungut zakatnya. Begitu pula bila ia mengembalikan barang sitaan, ia memungut zakat darinya. Begitu pula ia memungut zakat dari pemberian bila telah berada di tangan penerima. Lihat, Al-Amwal, hal. 432

Dengan demikian upah ('umalah) adalah sesuatu yang diterima seseorang karena kerjanya, seperti gaji pegawai dan karyawan pada masa sekarang. Harta sitaan (mazalim) ialah harta benda yang disita oleh penguasa karena tindakan tidak benar pada masa-masa yang telah silam dan pemiliknya menganggapnya sudah hilang atau tidak ada lagi, yang bila barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya merupakan penghasilan baru bagi pemilik itu. Pemberian (u'tiyat) adalah harta seperti honorarium atau biaya hidup yang dikeluarkan oleh Baitul mal untuk tentara Islam dan orang-orang yang berada dibawah kekuasaannya.

Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan,

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يُ

Artinya : bahwa Umar bin Abdul Aziz memungut zakat pemberian dan hadiah. Lihat, al-Mushannaf, III: 85

Syekh al-Qardhawi berkata, “Itu adalah pendapat Umar. Bahkan hadiah-hadiah atau bea-bea yang diberikan kepada para duta baik sebagai pemberian, tip, atau kado, ditarik zakatnya. Hal itu sama dengan apa yang dilakukan oleh banyak negara sekarang dalam pengenaan pajak atas hadiah-hadiah tersebut”.

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas kelompok pertama berpendapat bahwa zakat profesi itu disyariatkan, bahkan mereka menetapkan bahwa kewajiban zakat itu tidak terbatas hanya atas gaji (*al-‘atha*), tetapi meliputi tunjangan (*al-‘umalah*), hadiah (*al-jaizah*), dan harta yang pernah dirampas (*al-Mazhalim*).

BAB IV
ANALISA FATWA MUI NO.3 TAHUN 2003 TERHADAP PERSEPSI
DOSEN SYARIAH UIN SUSKA

A. Fatwa MUI No.3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan

Ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003
Tentang Zakat Penghasilan, Memutuskan Menetapkan : Fatwa Tentang Zakat
Penghasilan

Umum:

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain- lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupub tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Hukum :

Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram

Waktu Pengeluaran Zakat

1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.
2. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

Kadar Zakat

Kadar zakat penghasilan adalah 2,5 %.³⁹

B. Persepsi Dosen Terhadap Zakat Penghasilan

Islam adalah agama yang memperhatikan kesejahteraan sosial. Hal ini dapat dilihat dari adanya aturan untuk membayar zakat, yaitu memberikan harta dari orang kaya kepada orang miskin. Kemiskinan adalah hal yang sudah dikenal sejak beberapa abad yang silam. Dengan demikian umat manusia tidak pernah jauh dari kegiatan bagaimana mengusahakan agar hal ini bisa diatasi. Cara yang paling baik untuk memberikan harta adalah dengan zakat, dengan ukuran yang tidak menyulitkan bagi si kaya, zakat dapat meningkatkan taraf hidup si miskin, menyelamatkan dari kesengsaraan hidup si miskin, menyelamatkan dari kesengsaraan hidup dan beban kehidupan yang berat.

Lembaga-lembaga konsultasi zakat yang ada belum sepenuhnya mampu mensosialisasikan pengetahuan tentang zakat kepada masyarakat. Sementara perkembangan zakat setiap hari terus berkembang dan bervariasi. Pada dasarnya dalam memahami zakat penghasilan dosen Fakultas Syariah sudah cukup baik ini dilihat dari hasil wawancara dan angket penelitian mereka rata-rata sudah mengetahui tentang Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan..

³⁹ Hikmat Kurnia dkk, Fatwa-Fatwa Tentang Zakat (fatwa MUI No. 3 Tahun 2003), (Jakarta : Qultum media, 2008) h. 209

Tabel. 03

Mengetahui Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 Tentang zakat penghasilan

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Mengetahui	37	92.5 %
2	Tidak Mengetahui	3	7.5%
Jumlah		40	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata dosen Syariah mengetahui tentang Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat penghasilan. Dari data di atas 92,5 Persen mengetahui sedangkan 7.5 persen mereka tidak mengetahui.

Selanjutnya dosen syariah yang mengeluarkan zakat penghasilannya dapat di lihat pada tabel dibawah ini

Tabel. 04

Dosen Syariah Mengeluarkan Zakat Penghasilannya

NO	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase1
1	Ya	30	75%
2	Tidak	10	25%
Jumlah		40%	100%

Dari data diatas dapat di ketahui bahwa tidak semua dosen syariah mengeluarkan zakat penghasilannya dari data diatas menjelaskan 75 % mengeluarkan zakatnya, sedangkan 25 % lagi tidak mengeluarkan zakat

penghasilannya. Dari data diatas maka penulis ingin mengetahui apa alasan dosen syariah mengeluarkan zakat penghasilannya. Dapat di lihat dalam tabel berikut ini

Tabel. 05
Alasan Dosen Syariah Mengeluarkan Zakat Penghasilan

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Berdasarkan Nash Surat Al-Baqarah ayat 267.	18	45%
2	Di qiyaskan pada zakat pertanian	22	55%
3	Di qiyaskan pada zakat perdagangan	-	-
Jumlah		40	100%

Dari hasil angket diatas dijelaskan bahwa 45% responden alasan mereka berdasarkan nash surat al-Baqarah ayat 267 dari wawancara mereka mengatakan surat al –Baqarah ayat 267 ini terdapat perintah zakat yang berbunyi:



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik .(Q.S. Al-Baqarah)

Sedangkan alasan responden menqiyaskan meraka berpendapat, Para pegawai, mereka panen setiap bulan dan yang diterimanya adalah uang. Batas minimum nisab setiap bulan (analogi kepada petani). Dengan demikian, harta yang diperoleh benar-benar sudah bersih dan cara perhitungannya juga tidak sukar seperti menentukan kebutuhan setiap bulannya.

Kemudian alasan dosen mengeluarkan zakat penghasilan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 06
Alasan logika Dosen Mengeluarkan zakat Penghasilan
(jawaban bisa lebih dari satu)

NO	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Untuk mensucikan harta	40	100%
2	Untuk membantu faqir miskin	40	100%
3	Untuk menenangkan jiwa	40	100%

Dari tabel ini dapat dijelaskan bahwa, alasan responden mengeluarkan zakat penghasilannya dari angket yang disebarkan mereka menjawab 100% bahwa zakat dikeluarkan untuk mensucikan harta, untuk membantu faqir miskin, dan untuk menenangkan jiwa. Selanjutnya perasaan responden setelah mengeluarkan zakat penghasilannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 07
Perasaan Dosen Syariah setelah mengeluarkan zakat penghasilan

NO	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Jiwa semakin tenang	37	92.5%
2	Merasa terlepas dari kewajiban	3	7.5%
3	Biasa saja		
Jumlah		40	100%

Dari tabel ini dapat dijelaskan perasaan responden setelah mengeluarkan zakat yaitu 92.5 % mengatakan bahwa perasaan semakin tenang setelah mengeluarkan zakat, sedangkan 8.5 % mengatakan merasa terlepas dari

kewajiban setelah mereka mengeluarkan zakatnya. Alasan dosen tidak mengeluarkan zakat penghasilannya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel. 08

Alasan Dosen Syariah tidak mengeluarkan zakat penghasilan (Jawaban bisa lebih dari satu)

NO	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Tidak Ada Nash Yang Pasti Tentang Zakat Penghasilan	2	5%
2	Penghasilan saya, tidak mencapai nisab	32	80%
3	Saya keadaan dalam hutang	6	15%
Jumlah		40	100%

Dari tabel berikut sebanyak 5% menjawab bahwa tidak ada nas yang pasti tentang zakat penghasilan. Selanjutnya 80% responden menjawab penghasilan yang harus mencapai nisab dahulu baru bisa mengeluarkan zakat. Sedangkan 15 % mengatakan bahwa bila masih dalam keadaan dalam berhutang maka tidak wajib mengeluarkan zakat penghasilannya.

Tabel berikut ini adalah bagaimanakah seharusnya zakat dikelola

Tabel. 09

Bagaimana seharusnya pengelolaan zakat penghasilan

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Dikelola melalui amil tertentu	15	37.5%
2	Dikelola oleh Pemerintah	10	25%
3	Terserah kepada Muzakki	15	37.5%
Jumlah		40	100%

Dari hasil angket diatas menjelaskan bahwa 37.5% pengelolaan zakat penghasilan sebaihya dikelola oleh amil tertentu, sedangkan 25% sebaihnya dikelola oleh pemerintah, dan 37.5% menjelaskan bahwa terserah kepada muzakki dimana zakat di kelola. Analisa penulis dalam masalah ini disebabkan bahwa pemahaman dalam pengelolaan zakat mereka tidak sama disebabkan persepsi dalam setiap pengelolaan zakat berbeda.

C. Tinjauan Fatwa MUI Terhadap Persepsi Dosen

Islam adalah agama yang sempurna yang muamat berbagai persoalan kehidupan manusia, baik diungkapkan secara global maupun secara rinci. Secara substantif ajaran Islam yang diturunkan Allah SWT kepada Rasulullah terbagi kepada pilihan, yakni Aqidah, Syariah dan Muamalah.

Ajaran Islam yang mengatur perilaku manusia, baik dalam kaitannya sebagai makhluk dengan tuhan nya maupun dalam kaitannya sebagai sesama makhluk, dalam term fiqh dan ushul fiqh disebut dengan syariah. Sesuai dengan aspek yang diaturnya, syariah terbagi menjadi dua, yakni ibadah dan muamlah. Ibadah adalah syariah yang mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan nya, sedangkan muamalah adalah syariah yang mengatur hubungan antara sesama manusia.

Islam sangat peduli kepada pembangunan sosial ekonomi ummat. Islam mempunyai perhatian yang tinggi untuk melepaskan orang miskin dan kaum dhu'afa dari kemiskinan dan keterbelakangan, tanpa harus didahului oleh gerakan revolusi kaum miskin dalam menuntut perubahan nasibnya. Perhatian

Islam terhadap kaum dhu'afa tidak bersifat insidentil, tetapi regular dan sistematis.

Sebagai sebuah Negara yang memiliki populasi muslim terbesar dunia. Persoalan zakat penghasilan pun menjadi tak dapat dipisahkan dari kehidupan social masyarakat Indonesia. Apalagi zakat penghasilan bisa menjadi sumber keuangan Negara. Zakat penghasilan merupakan hasil ijtihad ulama kontemporer, yang awalnya belum dikenal dalam khazanah Islam. Penghasilan yang berupa harta dikategorikan berdasarkan qiyas atas kemiripan, terdapat karekteristik harta zakat yang telah ada ialah bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang yang dinisabnya 520 kg beras diqiyaskan dengan zakat pertanian, sedangkan nisabnya 85 gram emas maka diqiyaskan dengan zakat emas yang besarnya 2.5 %.

Memahami zakat penghasilan sangatlah penting sebagai seorang umat Islam karena tanpa memahami apa itu zakat penghasilan mustahil akan dilaksanakan. Pembayaran zakat sangat berdampak pada bidang ekonomi. Sebagai seorang dosen di fakultas syariah UIN Suska riau yang mempunyai gaji tetap dan melebihi kebutuhan pokok keluarganya wajib untuk mengeluarkan zakat penghasilannya. Banyak kemaslahatan yang akan timbul jika pembayaran zakat secara tepat dilakukan.

Dalam menjalani satusnya seorang dosen masih banyak yang tidak menyadari arti pentingnya zakat penghasilan sehingga masih banyak yang tidak membayar secara rutin. Sehingga dengan pembayaran tersebut dapat

membantu saudara kita yang masih kekurangan dan susah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kemudian ada pula Dosen yang tidak pernah membayar zakat penghasilannya disebabkan perbedaan pandangan dalam memahami terhadap zakat penghasilan itu sendiri. Sangat disayangkan padahal menafkahkan sebagian kecil dari harta tidak akan berdampak buruk bagi si pemilik harta tersebut, malah sebaliknya. Allah juga menegaskan di dalam Al-Quran bahwa kebaikan seseorang tidak akan sempurna hingga ia menafkahkan hartanya dalam surat Ali Imran ayat 92.



Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.⁴⁰ (QS. Ali-Imran: 92)

Menurut hemat penulis, semua macam penghasilan terkena wajib zakat. Ini berdasarkan surat albaqarah ayat 267 :

Kata “ ” adalah termasuk kata yang mengandung pengertian yang umum, yang artinya “apa saja” jadi artinya “ sebagian dari hasil (apa saja) yang kamu usahakan yang baik-baik”. Maka jelaslah, bahwa semua

⁴⁰Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 62

macam penghasilan (gaji, honorium, dan lain-lainnya) terkena wajib zakat berdasarkan ketentuan surat al-Baqarah ayat 267 tersebut yang mengandung pengertian yang umum, asal penghasilan tersebut telah melebihi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya yang berupa sandang, pangan, papan beserta alat-alat rumah tangganya, alat-alat kerja/usaha, kendaraan dan lain-lain yang tidak bisa diabaikan. Bebas dari beban hutang, baik terhadap Allah seperti nazar haji yang belum ditunaikan maupun terhadap sesama manusia, kemudian penghasilannya masih mencapai nisab⁴¹.

Bagi mereka yang mempunyai penghasilan yang cukup besar, seperti mereka yang memiliki profesi modern, atau jabatan-jabatan rangkap yang penting (fungsional dan struktural) dan yang semacam itu, maka penulis ingin menyarankan agar mereka mengeluarkan zakatnya secara *ta'jil*, artinya mengeluarkan sebelum waktunya dengan cara memberi kuasa kepada bendaharawan di instansi yang bersangkutan untuk memotong 2.5 % sebagai zakatnya.

Manusia sebagai makhluk sosial, tidak dapat hidup sendiri-sendiri artinya saling membutuhkan orang lain. Untuk itu harus adanya sikap tolong-menolong antar sesama sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2:

⁴¹ Masjfuk Zuhdi, *Op. Cit*, h. 221

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan urian pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan. Adanya kesimpulan mengenai persepsi Dosen Syariah terhadap zakat penghasilan menurut fatwa MUI No. 3 Tahun 2003:

1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi Dosen Syariah UIN Suska terhadap zakat penghasilan tergolong cukup baik, hal ini dapat dibuktikan dari wawancara dan angket yang telah disebarkan di kantor Fakultas Syariah maupun dengan dosen yang tidak berkantor di fakultas syariah dan dapat dilihat dalam bab 4. Akan tetapi zakat penghasilan ini belum di optimalkan dengan baik.
2. Dalam memahami zakat penghasilan Dosen syariah UIN Suska berbeda pendapat dalam alasan mengeluarkan zakat berdasarkan nash surat al-baqarah ayat 267 dan diqiyaskan ke zakat pertanian.
3. Sedangkan zakat penghasilan menurut tinjauan Fatwa MUI No.3 Tahun 2003, bahwa dengan dilaksanakannya zakat penghasilan ini. Akan menimbulkan kemaslahatan pada masyarakat disekitarnya, karena, harta yang mereka miliki tidak beredar dikalangan tertentu saja. Dan tentunya

zakat penghasilan ini dikeluarkan setelah mencapai nisab dari hasil bersih dan bukan dari hasil kotor atau bruto.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas maka penulis akan memberikan saran yang dianggap relevan dan kiranya bisa membantu terhadap penelitian ini, yaitu:

1. Dalam meningkatkan persepsi/pandangan terutama bagi Dosen Syariah yang gajinya bisa dikatakan melebihi kebutuhan pokok mereka hendaknya perlu diadakan seminar atau penyuluhan secara mendalam sehingga perlu ditingkatkan secara lebih baik lagi pemahaman terhadap zakat penghasilan.
2. Kepada MUI seharusnya lebih banyak melakukan proaktif untuk mensosialisasikan fatwa nya ini dilihat ada juga sebagian dosen tidak mengetahui Fatwa MUI No.3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.
3. Kepada pihak UIN Suska diharapkan bisa membuat Unit Pengumpulan Zakat agar bisa di optimalkan zakat penghasilan dengan baik dilingkungan UIN Suska.
4. Kepada si pembaca penulis berharap agar skripsi ini menambah khaznah keilmuan dan bermanfaat bagi semua kalangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Zainal, ***Kunci Ibadah***, (Semarang: Toha Putra, 1951)
- Abu Luis Al-Ma'li, ***Al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-A'lam***, (Dar al-Masyriq: Asy-Syarqiyah, 1925).
- Abdurrahman Al-Jziry, ***Al-Fiqhu ala Mazhib al-Arba'ah***, Juz 1 (Beirut : Dar al-Fikri, 1411/H 1990 M).
- Ali Ahmad al-Nadwy, ***Al-Qawaid al-Fiqhiyyah***, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994).
- Ali Mustafa Yaqub, ***Hadis-Hadis Bermasalah***, cet. Kedua, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003).
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih, ***Fatwa-Fatwa Zakat***, ter. Suharlan, dkk. cet. I, (Jakarta: Darus Sunah, 2008).
- Afzalurrahman, ***Doktrin Ekonomi Islam***, alih Bahasa: Nastangin S, Jilid III (Yogyakarta : Dana Bhakti Waqof, 1996).
- As-Shiddiqy Hasby, ***Pedoman Zakat***, Cet, II (Semarang: Pustaka Rizki, 1999).
- As-Siddqy Hasby, ***Beberapa Permasalahan Zakat***, (Jakarta : Tinta Mas, 1976).
- Buku Panduan Akademik UIN Suska 2010 .
- Depag RI, ***Al-Quran dan Terjemahannya***, Cet ke 1 (Jakarta : Magfirah Pustaka, 2006).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997),
- Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, ***Jurnal Hukum Islam 2008***, (Pekanbaru, 2008)
- Halim M. Niphan Abdullah, ***Mengapa Zakat Disyari'atkan***, cet. I, (Bandung: M2S Bandung, 2001).
- Hasibuan Supardi Ahmad, ***Konsepsi Zakat Profesi Menurut Yusuf Qardawi Dan Penerapannya Pada Masa Kini***, (Pps : UIN Suska, 2009).
- Husain Ahmad, ***Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru***, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996).

Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Fatwa-Fatwa Tentang Zakat (Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003)*, (Jakarta: Qultum Media, 2008)

Jamal al-Banna, *Manifesto Fiqih Baru 1: Memahami Diskursus al-Qur'an, judul asli: Nahwa Fiqh Jadid 1*, cet. I, (Jakarta: Erlangga, PT Gelora Aksara Pratama, 2008).

Imam Taqiyuddin Abi Bakar Bin Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar*, (Surabaya : syirkat an-Nur al-Ilmiyah).

Mahyuddin, *Masail Fiqhiyah Kalam Mulia*, (Jakarta: 1997).

Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, cet- 10 (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997).

Muhammad Abu Zahrah, *Zakat dalam Persepektif Sosial*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2004)

Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam* (Jakarta: Rajawali Pres, 2008)

Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Riau No. 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat.

Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, cet. Kesembilan, (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2006).

Sayyid Sabiq. *Fiqih As-Sunnah*, Alih Bahasa : Mahyudin Syaf, (Bandung: Al-Ma'arif, 1978)

Salil Peter, *Kamus Bahasa Indosia Kontemporer*, (Jakarta: Englis Press, 1991)

Shobirin, *Ijtihad Khulafa' al-Rasyidin*, cet. I, (Semarang: Rasail Media Group, 2008).

Sondang P. Siagian, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, (Jakarta: Reneka Cipta, 1995)

Undang-Undang Republik Indonesia Pengelolaan Zakat No. 38 Tahun 1999.

Walgito Bimo, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: Bima Aksara, 1984)

Wahbah Zuhayly, *Az-zakat: kajian berbagai mazhab*, cet. III, Judul asli: *al-Fiqh al-Islami Adillatuh*, (Bandung: Rosdakarya Offset, 1997).